

IRAN DI TENGAH HEGEMONI BARAT (Studi Politik Luar Negeri Iran Pasca Revolusi 1979)

Oleh : Kiki Mikail¹

Abstract:

This Paper to explain the foreign affairs policies that taken by Iranian Government from the begining of Islamic revolution in Iran through the presidency of Hassan rouhani period. Goals of Islamic government of Iran had been fluctuated between interests of Islamic world and interests of Iran; or in other word, between interests of Islam Umma (the nation of Islam) and national interests of Iran. Islamic principles have dominated on foreign policy of Iran but different conditions made the government to change its priorities of Foreign policy. in other word, Iran's foreign policy is always different according to the presiden although still based on revolution values.

Pendahuluan

Republik Islam Iran yang kerap dikenal dengan negeri para mullah yang semenjak tahun 1979 telah mengalami revolusi dari negara yang berbentuk monarki beralih kepada negara yang berbentuk republik, merupakan negara bekas salah satu emperatur terbesar didalam sejarah. Negara ini sekarang merupakan salah satu negara yang menggunakan syariat Islam² dalam menjalankan sistem pemerintahannya dengan menganut faham teokrasi³ dan dipimpin oleh seorang rahbar.⁴

Bangsa Iran adalah salah satu ras tertua didunia yang berasal dari Ras Arya (Bangsa Weda) yang merupakan salah satu ras Indo-European. Migrasi bangsa Arya ke berbagai belahan bumi seperti ke Asia kecil dan India dimulai pada 2.500 Sebelum Masehi (SM). Peradaban di dataran tinggi Iran dimulai 600 tahun SM di mana saat itu terdapat 2 kerajaan yakni Parsa di sebelah Selatan dan Medes di Timur Laut Iran⁵.

Pada abad ke 7, Kerajaan Persia luluh lantak dikarenakan invasi oleh pasukan Kerajaan Mesir dan Arab lainnya sehingga perlahan ajaran agama Islam mulai subur di tanah persia. Selain menyebarkan agama Islam, bangsa Arab juga telah merubah bahasa Iran yang

¹ Alumni Imam Khomeini International University, Jurusan Ilmu Politik

² Firouz Mujtahed Zadeh (1387), Demokrasi va hoveyyate Iran, entesharat kavir, Tehran, h. 159

³ http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Iran, di akses pada tanggal 13 April 2013 pada pukul 16.30 WIB

⁴ Rahbar di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan "Pemimpin"

⁵ http://id.wikibooks.org/wiki/India_Kuno/Sejarah/Bangsa_India-Eropa, diakses pada tanggal 09 Mei 2013 jam 19.00 WIB

awalnya berbahasa Persia, selama beberapa abad Iran menggunakan Bahasa Arab sebagai bahasa resmi negaranya.

Arab mulai masuk wilayah kekuasaan Kerajaan Sassanid pada tahun 633 ketika Jenderal Khalid Bin Walid menyerbu Mesopotamia (sekarang Irak) yang merupakan pusat politik dan ekonomi kerajaan Sassanid.⁶ Invasi kedua dimulai pada tahun 636 dibawah komando Saad Bin Abi Waqos, dimana kunci kemenangan dalam perang Qadisiyyah adalah berakhirnya kontrol Sassanid terhadap barat Persia. Gunung Zagros kemudian menjadi pembatas antara Kekhalifahan Islam dan kekaisaran Sassanid. Khalifah Umar Bin Khattab kemudian memerintahkan pasukan Islam untuk menginvasi Kekaisaran Sassanid secara penuh pada tahun 642 Masehi yang pada akhirnya kekaisaran Sassanid takluk terhadap pasukan Islam pada tahun 651. Dalam penguasaan Islam, Persia mulai mengalami tekanan hingga kekerasan, tempat peribadatan Zoroaster mulai dibakar oleh pasukan Islam. Akhirnya perlahan-lahan, Islam menjadi agama yang dominan di Persia.

Setelah berabad-abad dikuasai oleh pendudukan asing, Iran sekali lagi bersatu sebagai sebuah negara merdeka pada tahun 1501 Masehi di bawah dinasti Safawi yang menjadikan Islam Syi'ah sebagai ajaran resmi Iran. Iran menjadi Monarki dan diperintah oleh seorang Shah dari tahun 1501 sampai dengan terjadinya revolusi Islam Iran pada tahun 1979.

Pada tahun 1921 Masehi, terjadi kudeta militer yang dipimpin oleh Reza Shah Pahlevi yang kemudian menjatuhkan Ahmad Qajar sebagai pewaris terakhir dinasti Qajar dan mengangkat Reza Shah Pahlevi sebagai Raja Iran. Pada tahun 1941, anaknya bernama Mohammad Reza Shah naik tahta hingga terjadi Revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Uzma Ruhullah Imam Khomeini pada tahun 1979.⁷

Revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh ayatullah Uzma Ruhullah Imam Khomeini,⁸ merupakan salah satu revolusi terbesar dalam peristiwa bersejarah. Selain revolusi Islam Iran, Dunia juga mengenal istilah Revolusi lainnya seperti Revolusi Kuba (1952-1958), Revolusi Amerika (1775-1783)⁹, Revolusi Perancis serta Revolusi lainnya yang terjadi dibelahan

⁶ Stephen Humphreys (1999), *Between Memory and Desire: The Middle East in a Troubled Age*, University of California Press, H. 180

⁷ Walaupun revolusi tidak hanya dilakukan oleh Imam Khomeini sendiri, tapi dari berbagai kalangan elite politik termasuk juga partai politik seperti tudeh membantu dalam gerakan revolusi ini, tapi mayoritas masyarakat Iran mufakat bahwa tokoh Revolusi Islam Iran adalah Ayatullah Imam Khomeini.

⁸ Dalam Revolusi, ada beberapa tokoh dari partai politik, seperti hezbe tudeh, yang membantu terjadinya Revolusi, namun pada perkembangannya, Imam Khomeini lah yang paling mencuat namanya di Dunia internasional, lihat; *Tahavvolate Siyasi Ejtema'I ba'da az enghelabe Islami dar Iran (1386)*, Tehran : Arouz Press

⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Revolusi_Amerika_Serikat, diakses pada tanggal 10 Mei 2013 pada jam 12 : 38 WIB

dunia, yang tentunya revolusi tersebut memiliki kekhasan tersendiri dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem pemerintahan yang baru.

Beda halnya dengan Revolusi yang terjadi di pelbagai belahan dunia yang disebutkan di atas, revolusi Islam Iran lebih menekankan kepemimpinan negara yang di pimpin oleh ulama yang fakih dalam agama dan memiliki penguasaan ilmu pengetahuan multidisipliner. Sehingga, untuk menjadi “rahbar” di Republik Islam Iran, seorang rahbar membutuhkan waktu dan umur yang cukup lama sehingga mampu menguasai perbagai disiplin ilmu.

Politik Luar Negeri dan diplomasi Iran Menjelang Revolusi

Diplomasi menurut Sir Ernest satow adalah aplikasi intelejen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintah yang berdaulat, yang kadangkala diperluas dengan negara-negara jajahannya.¹⁰ Sedangkan menurut Barston diplomasi adalah manajemen antar hubungan negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya.¹¹

Untuk mencapai kepentingan negaranya, keterampilan dalam berdiplomasi merupakan syarat utama seorang diplomat yang terlibat dalam politik internasional, yang pada dasarnya dipergunakan untuk mencapai kesepakatan, kompromi, dan penyelesaian masalah internasional.

Oleh karena itu, presiden ataupun perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan sebagai penentu arah diplomasi suatu negara, membutuhkan keahlian berdiplomasi jika ingin kepentingan-kepentingan negaranya tercapai. Karena pada hakikatnya, kegiatan internasional yang dilakukan oleh suatu negara, tujuan utamanya adalah bagaimana membawa kepentingan negaranya di pentas dunia internasional.

Oleh karenanya, diplomasi dan kebijakan politik luar negeri suatu negara, tentunya tidak bisa terlepas dari peran seorang kepala pemerintahan. Dalam beberapa kasus, bahkan seorang kepala pemerintahan mampu mewarnai perpolitikan luar negeri suatu negara. Selain faktor kepala pemerintahan, kondisi domestik suatu negara juga merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri suatu negara. Dalam hal ini, Iran yang baru melakukan revolusi, langsung menghadapi tantangan yang cukup berat baik dari dalam maupun luar negeri. Sisa-sisa pengaruh dari syah reza pahlevi yang berkuasa

¹⁰ Sir Ernest Satow, A Guide To Diplomatic Practice dalam Sukawarsini Djelantik, Diplomasi antara teori dan Praktik, Yogyakarta ; Graha Ilmu, 2008 Hal. 3-4

¹¹ R.P Barston, Modern Diplomacy, dalam Sukawarsini Djelantik, Diplomasi antara teori dan Praktik, Yogyakarta ; Graha Ilmu, 2008 Hal. 4

selama beberapa dekade di tanah persia, membuat tokoh politik iran harus ekstra waspada terhadap sisa sisa pengaruh Shah.

Namun secara garis besar salah satu perbedaan mencolok antara Iran pra dan pasca revolusi adalah kebijakan luar negeri dan diplomasinya terhadap negara-negara super power seperti Amerika Serikat, Inggris dan Rusia yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan luar negeri Iran terutama mengenai cadangan minyak dan gas yang dimiliki oleh Iran disamping juga kebijakan Iran terhadap dunia Islam.

Inggris dan Rusia (Uni Soviet) bahkan sudah terlebih dahulu mencengkeram kekayaan Iran dengan kekuatan militer dan politiknya. Uni Soviet menguasai minyak Iran di bagian Utara Barat Iran sedangkan Inggris menguasai minyak Iran di Khuzestan yang terkenal dengan ladang minyak Iran. Soviet sendiri mulai menduduki Iran untuk mengamankan minyak Iran pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 17 September 1941. Sedangkan Inggris mulai menguasai Iran di mulai dari pelabuhan Abadan sebuah tempat instalasi minyak Iran yang terletak di Kota Khuzestan.

Selama perang dunia kedua, dengan semakin kuatnya pengaruh Inggris dan Uni Soviet di beberapa kota pusat instalasi minyak Iran, akhirnya Shah Pahlevi mulai mendekati Amerika Serikat yang pada saat itu dipandang oleh dunia Internasional sebagai salah satu negara kuat di dunia. Pada gilirannya, hubungan antara Iran dengan Amerika Serikat semakin baik ditandai dengan ditanda tanganinya kerjasama Iran dan Amerika Serikat dalam membuat program pengembangan nuklir pada tahun 1950-an sebagai bagian dari program Atom untuk program perdamaian. Dari sinilah Iran mulai mengembangkan nuklirnya.¹²

Inggris dan Uni Soviet yang telah lama bercokol ditanah Persia dan perlahan-lahan mulai merenggut kedaulatan Iran membuat Ahmad Shah Qajar penguasa terakhir dinasti Qajar dianggap oleh kalangan masyarakat Iran tidak mampu menghentikan Inggris dan Uni Soviet dalam merampas kedaulatannya. Puncaknya, pada tanggal 12 Desember 1925 Majelis nasional menurunkan Ahmad Qajar dari singgasana kekuasaan dan mengangkat Reza Pahlevi sebagai penguasa baru dinegeri Persia.¹³ Pada tahun 1935, Reza Pahlevi mengumumkan kepada kedutaan-kedutaan asing yang ada dipersia untuk menyebut Persia Kuno dengan nama baru, yaitu Iran.

Reza Shah Pahlevi memulai politiknya dengan berusaha menjauhi cengkeraman Inggris dan Uni Soviet. Meskipun tenaga asing sangat dibutuhkan dalam proyek-proyek

¹² Hossein Abadian (1377), *The Political Biography of Mozaffar Baghai* (in Persian), Teheran : Political Studies and Research Institute, h. 106

¹³ Jessup, John E. (1989). *A Chronology of Conflict and Resolution, 1945-1985*. New York: Greenwood Press, h. 35

minyak Iran, namun Shah Pahlevi tetap berusaha untuk menghindari pemberian kontrak kerja sama kepada perusahaan-perusahaan Inggris dan Uni Soviet. Meskipun Inggris memiliki saham yang sangat besar di perusahaan Anglo-Iranian Oil Company dan menguasai sumber daya minyak Iran, Reza Pahlevi lebih suka untuk mendapatkan bantuan teknis dari pihak Jerman, Perancis, Italia, dan negara-negara Eropa lainnya.

Perlahan-lahan, Sistem perpolitikan di Iran menjadi semakin terbuka sehingga menjadikan partai politik semakin tumbuh subur di tanah Persia. Pada tahun 1944, pemilihan Majelis Nasional Iran merupakan pemilihan pertama yang dilakukan secara terbuka jika dibandingkan dengan pemilihan 20 tahun ke belakang. Akan tetapi, pengaruh dan dominasi asing, tetap menjadi isu yang sangat sensitif bagi semua kalangan masyarakat Iran.

Pada tanggal 16 September 1941, Muhammad Reza Pahlevi menggantikan ayahnya untuk memimpin Iran. Dia ingin melanjutkan kebijakan reformis ayahnya, akan tetapi Muhammad Reza Pahlevi mendapat seteru politik yang sangat kuat dari seorang politisi profesional dan berjiwa nasionalisme tinggi yaitu Dr. Muhammad Mosaddegh yang telah berhasil menasionalisasi industri minyak Inggris. Pada tahun 1951 Mosaddegh berhasil menjadi perdana menteri Iran setelah terpilih dalam sidang parlemen.

Pada tahun 1954, Shah Pahlevi sempat pergi dari Iran karena memuncaknya perlawanan rakyat terhadap dirinya. Namun, tiga hari kemudian, dia berhasil merebut kembali tahtanya melalui kudeta terhadap pemerintahan Musaddeq yang dipilih oleh rakyat Iran. Kudeta ini didukung oleh AS sehingga infiltrasi AS dalam pemerintahan Shah Pahlevi sangat besar. Shah Pahlevi berhasil menguasai Iran kembali secara penuh dengan dibantu oleh Amerika Serikat. Dibawah kepemimpinan Shah Pahlevi, militer Iran saat itu termasuk salah satu militer yang memiliki kekuatan terbesar di dunia.

Pada tahun 1970-an, Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter mulai menekankan pentingnya menjaga hak asasi manusia kepada dunia internasional, termasuk terhadap Shah Pahlevi yang saat itu dalam pemerintahannya banyak terjadi pelanggaran HAM. Karena kedekatannya kepada Amerika Serikat, maka segala yang di perintahkan Amerika Serikat, selalu di laksanakan dengan baik oleh Shah Pahlevi, walaupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Shah pahlevi harus bertolak belakang dari keinginan hati nurani rakyat Iran.

Seperti halnya dengan pemerintahan ayahnya, Rezim Shah Pahlevi dikenal dengan Otokrasinya, yang fokus terhadap Modernisasi dan Westernisasi dan mengabaikan nilai-nilai agama dan langkah-langkah demokratis dalam menjalankan konstitusi Iran.¹⁴ Akhirnya,

¹⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_Revolution, di akses pada tanggal 27 Juli 2013 jam 10. 25 WIB

oposisi Iran, baik dari kaum ruhaniawan, liberal, moderat dan seluruh elemen masyarakat Iran, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang diasingkan oleh rezim syah mulai tidak menyukai Shah Pahlevi dengan membentuk organisasi perlawanan dan mengirimkan surat terbuka kepada shah atas ketidak puasannya terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Shah Pahlevi.

Setelah perjalanan luar negerinya ke Turki pada tanggal 2 Juni 1934, Reza Shah mulai terpengaruh dengan pola pemikiran Mustofa kemal Attaturk yang sekuler. Pada saat itu, banyak rumor beredar di kalangan masyarakat tentang larangan memakai jilbab di sekolah-sekolah putri, meskipun tidak ada undang-undang yang syah dalam pelarangan penggunaan jilbab tersebut.

Pada tahun 1928, Majelis Permusyawaratan Nasional mengesahkan Undang-undang yang meminta pakaian seragam untuk dikenakan oleh orang-orang Iran. Berdasarkan Undang-undang tersebut, kaum laki-laki di Iran harus menggunakan pakaian ala Eropa. Bahkan di kantor-kantor pemerintahan, pejabat harus menggunakan pakaian ala barat jika ingin tetap menjabat. Inilah alasan utama menurut para sejarawan asal mula diterapkannya kebijakan pelarangan jilbab di kalangan perempuan masyarakat Iran.

Akhirnya masyarakat Iran marah. Puncaknya adalah naiknya harga minyak dan inflasi serta tidak meratanya pertumbuhan ekonomi masyarakat Iran¹⁵, di tambah lagi dengan sikap rezim Shah Pahlevi yang represif dan berkembangnya anggapan di tengah masyarakat Iran bahwa rezim Shah telah menjadi boneka Amerika Serikat dengan meluasnya sekulerisme dan westernisasi di Iran. Pada saat yang sama, dukungan kepada Shah dari politisi dan media barat pun perlahan mulai memudar, terutama dukungan dari pemerintahan Jimmy Carter yang mulai meninggalkan rezim Shah Pahlevi. Rezim Shah dipandang sebagai rezim yang korup dan boros serta terlalu mengedepankan kepentingan Amerika Serikat ketimbang kepentingan rakyat Iran.

Menghadapi perlawanan yang begitu dahsyat dari seluruh elemen masyarakat Iran, Muhammad Shah Pahlevi meminta dukungan kepada Amerika Serikat. Shah yakin, dengan kedekatannya dengan Amerika Serikat dan posisi yang strategis berbatasan dengan Uni Soviet (musuh Amerika Serikat pada perang dingin), dapat mengambil simpati Amerika Serikat yang kemudian dapat membantu Shah dari permasalahan dalam negerinya. Tapi sampai terjadinya Revolusi, Amerika tidak dapat berbuat banyak untuk Shah, karena rakyat Iran sudah bosan dengan kepemimpinan Shah yang begitu represif.

¹⁵ Ervand Abrahamian, *Iran Between Two Revolutions*, (1982), Princenton University Press, New Jersey, p. 534-535

Demonstrasi melawan rezim shah Pahlevi dimulai pada bulan Oktober 1977 yang kemudian berkembang menjadi kampanye perlawanan masyarakat terutama kaum ulama terhadap rezim Shah Pahlevi.¹⁶ Ulama pada masa rezim shah Pahlevi sudah tidak dihargai sama sekali.

Antara Agustus dan Desember 1978, pemogokan dan demonstrasi besar-besaran semakin melumpuhkan ekonomi dan politik Iran. Akhirnya, Mohammad Reza Pahlevi meninggalkan Iran dan menjalani pengasingan pada Januari 1979. Pada 1 Pebruari 1979, pemimpin kharismatik Iran, Ayatullah Uzma Imam Khomeini, kembali ke Tehran setelah sebelumnya diasingkan oleh Shah Pahlevi ke Paris. Jutaan masyarakat Iran menyambut kedatangan Imam Khomeini dengan penuh suka cita¹⁷.

Kejatuhan terakhir dinasti Pahlevi terjadi setelah tanggal 1 Pebruari 1979 angkatan bersenjata Iran dan SAVAK menyatakan dirinya netral setelah sebelumnya gerilyawan dan pasukan pemberontak mengalahkan tentara yang loyal kepada Shah dalam pertempuran jalanan. Iran secara resmi menjadi negara Republik Islam pada tanggal 1 April 1979 ketika sebagian besar bangsa Iran menyetujuinya melalui referendum Nasional.

Kebijakan politik luar negeri Iran pasca Revolusi Islam

1. Politik luar negeri Imam Khomeini

Politik luar negeri selalu menjadi kajian yang sarat dengan kontroversi, tetapi politik luar negeri suatu bangsa memiliki peran dan arti yang sangat strategis karena mampu menentukan nasib suatu bangsa dan dapat dijadikan alat untuk mempromosikan agenda politik, ekonomi, dan budaya suatu bangsa. Imam Khomeini sebagai pemimpin Revolusi Islam Iran meletakkan pondasi politik luar negerinya yang sarat dengan ketentuan dan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Imam Khomeini mempertahankan kebijakan luar negeri harus didasarkan pada ideologi, yaitu kebijakan luar negeri berarti kebijakan negara-negara Muslim dalam menghadapi negara-negara yang berada di luar perbatasan negara Islam.

Karena Imam Khomeini adalah seorang pemimpin dengan ide-ide politik yang terinspirasi oleh Islam, maka imam menggambarkan prinsip-prinsip dasar pemikirannya dari sumber utama Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Pada kenyataannya, arah kebijakan politik luar negeri Iran mulai terstruktur setelah imam mengkonsepkan dasar

¹⁶ Amuzegar, *The Dynamics of the Iranian Revolution*, (1991), p.4, 9–12

¹⁷ Ervand Abrahamian, *History of Modern Iran*, Cambridge University Press, 2008, p. 161

pemikiran Islam dalam konsep Wilayatul Faqih. Oleh karena itu, nilai-nilai moral membentuk fundamen prinsip kebijakan luar negeri Iran, akan tetapi menurut Imam, Islam dan agama tidak dapat dibatasi dengan etika dan moral.

Tujuan dari revolusi Islam sendiri menurut Imam Khomeini adalah untuk mempromosikan Islam, etika Islam, etika manusia serta meningkatkan manusia atas dasar kriteria manusia. Selain itu, Pemerintahan Islam Iran dalam menjalankan kebijakan luar negerinya harus sama dalam pandangannya mengenai etika manusia. Imam Khomeini melandaskan pemikirannya tentang hakikat manusia sesuai dengan perkataan Ali Bin Abi Tholib, “bantulah orang-orang yang tertindas dan lawanlah penindas”!

Imam Khomeini lahir pada tanggal 24 September 1902 (20 Jumadil Akhir 1320) di kota kecil Khomein, sekitar 160 kilometer di sebelah barat daya dari Qom. Imam Khomeini adalah anak dari keluarga yang taat dan ahli agama. Imam Khomeini menghabiskan waktu kurang lebih 15 tahun dalam pengasingan dikarenakan melawan setiap kebijakan politik Shah. Dalam tulisan-tulisan dan setiap dakwahnya, Imam Khomeini mengutarakan pemikirannya mengenai kepemimpinan dalam Islam yang terangkum dalam sistem Wilayatul Faqih (baca; Velayat e-faqih).

Pasca revolusi, Iran dengan sistem wilayatul faqihnya saat ini memiliki hubungan diplomatik penuh dengan 99 negara di seluruh dunia.¹⁸ Republik Islam Iran mengutamakan hubungan dengan negara –negara dan organisasi Islam seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI), selain juga dengan organisasi gerakan non blok. Iran berusaha untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara luar dikarenakan isolasi ekonomi dan politik oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.¹⁹ Isolasi dalam berbagai sanksi ekonomi dan embargo terjadi dikarenakan pihak barat menuding Iran sedang mengembangkan program nuklirnya.

Pada tahun 1980 hingga 1989 terjadi perang teluk antara Iran dengan Irak. Iran yang baru saja membenahi pemerintahan dan merevolusi sistem pemerintahannya harus menghadapi cobaan berat ketika Irak mencoba menginvasi Iran pada tahun 1980 an. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa kebijakan politik luar negeri di era Imam Khomeini lebih banyak dialihkan kepada situasi yang terjadi pada saat itu, yaitu memperjuangkan Iran dan mengusir Irak.

Iran dengan Irak yang dalam sejarah memiliki hubungan yang sangat kelim diantara keduanya dikarenakan Iran mendukung gerakan separatis di Irak disebabkan para penganut mazhab syiah mendapatkan tindakan kekerasan dan ketidakadilan sedangkan Irak juga tidak

¹⁸ [Ministry of Foreign Affairs, Islamic Republic of Iran](#), diakses pada tanggal 25 Oktober 2013

¹⁹ Graham E, Fuller (2003), *The Future of Political Islam*, Palgrave MacMillan, h. 41

menyukai Iran dikarenakan Suku kurdi yang mayoritas penganut mazhab sunni tidak mendapatkan hak-hak politiknya. Maka, setelah melihat keadaan yang sangat genting karena dalam masa transisi di Republik Islam Iran, Saddam Husen berusaha memanfaatkan situasi dengan menginvasi Iran dengan meminta dukungan barat yang baru saja mengisolasi dan mengembargo Iran dikarenakan program nuklirnya.

Iran memang pernah dikenal dengan salah satu negara yang memiliki pasukan militer terkuat di dunia, tetapi itu di masa kerajaan Shah Reza Pahlevi. Setelah gulingnya rezim shah Pahlevi, Imam Khomeini berusaha menata sistem pemerintahannya dengan tetap mempertahankan pasukan militer murni ditambah dengan pasukan basiji yang didik oleh pasukan garda revolusi yang loyal dan setia mendukung dan mempertahankan revolusi.

Maka, setelah bubarnya pasukan militer yang dibentuk oleh Reza Pahlevi, Saddam Husen berambisi menjadikan Irak negara terkuat di timur tengah dengan menginvasi Iran dan berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan mengakuisasi wilayah-wilayah yang menjadi perbatasan antara Irak dengan Iran. Dengan ambisi ini, Saddam Husen merencanakan serangan dalam skala besar dan berangan-angan dapat menduduki ibukota Iran dalam waktu tiga hari.

Pada tanggal 22 September 1980, tentara Irak mulai menginvasi Iran di Khuzestan. Serangan tersebut benar-benar membuat Iran terkejut. Meskipun dengan serangan yang dilakukan tentara saddam dapat menduduki beberapa kota di Iran, tapi pada tahun 1982 pasukan Iran berhasil memukul balik tentara Saddam ke Irak. Tak lama setelah itu, Imam Khomeini melancarkan serangan balik dengan membangkitkan persatuan sesama penganut mazhab Syiah yang ada di Irak. Perang teluk kemudian terus berlanjut dan berakhir pada tahun 1988, ketika Irak dan Iran menandatangani perjanjian gencatan senjata yang diperantarai oleh PBB.

Pululahan ribu warga sipil dan militer tewas ketika Irak menggunakan senjata kimia dalam peperangan tersebut. Irak secara finansial didukung oleh Mesir, negara-negara Arab di Teluk Persia, Uni Soviet dan negara anggota NATO, Amerika Serikat (mulai tahun 1983), Perancis, Inggris, Jerman, Brasil, dan Republik Rakyat Cina (yang juga menjual senjata ke Iran). Total korban perang sekitar 500.000 hingga 1.000.000 rakyat Iran.²⁰

2. Politik Iran di era Banisadr

²⁰ Centre for Documents of The Imposed War, Tehran. (مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ)

Abbolhasan Banisadr, Presiden pertama Republik Islam Iran yang terpilih pada masa-masa transisi. Beliau lahir di Hamedan²¹ pada tanggal 22 Maret 1933 dan dipilih menjadi presiden Iran pada tanggal 4 Pebruari 1980 setelah terjadinya Revolusi Islam. Sebelum terpilih menjadi Presiden Iran, Bani Shadr adalah menteri Luar Negeri Iran. Bapak Abbolhasan Banisadr adalah kawan dekat Imam Khomeini.²²

Banisadr merupakan salah satu aktivis mahasiswa anti Shah yang pada tahun 1960-an kerap di penjarakan oleh Shah Pahlevi. Dikarenakan mendapat tekanan dari pemerintah, Ia kemudian pergi ke Prancis dan melanjutkan studinya di Universitas Sorbonne. Banisadr bertemu dengan Imam Khomeini dan akhirnya ia bergabung dengan kelompok perlawanan Iran yang dipimpin oleh Imam Khomeini.²³

Banisadr menjadi Presiden Iran ditengah tekanan dunia barat dengan isolasi dan embargonya terhadap Iran. Banisadr menjadi Presiden Iran hanya dalam kurun waktu setahun lebih yang kemudian diberhentikan dari kursi presiden pada tanggal 21 Juni 1981 yang diduga bergerak melawan para ulama yang berkuasa, khususnya Mohammad Behesti kepala sistem peradilan Iran.

Banisadr kemudian bersembunyi di Tehran selama beberapa hari sebelum pelengserannya dari kursi Presiden dan dilindungi oleh partai “Mojaheden khalghe Iran”. Banisadsr berusaha menggalang dukungan dengan berusaha mengatur aliansi partai-partai yang anti terhadap Imam Khomenei. Dalam pandangannya, proses penggulingannya adalah bagian dari sistem pelemahan demokratisasi di Iran.²⁴

3. Era Mohammad Ali Rajai

Mohammad Ali Rajai lahir di Qazvin, Iran, bapaknya meninggal ketika dia berusia 4 tahun. Rajai tumbuh dewasa di Qazvin dan hijrah ke Tehran pada tahun 1946. Setelah kepindahannya ke Tehran, Ali Rajai terlibat aktif dengan berbagai organisasi dan kelompok-kelompok anti Shah.²⁵ Ali Rajai salah satu aktivis muda yang kerap mengkritik kebijakan

²¹ Hamedan adalah Kota tempat dimakamkannya seorang ulama besar Islam yaitu Ibnu sina

²² Jessup, John E. (1998). *An Encyclopedic Dictionary of Conflict and Conflict Resolution, 1945-1996*. Westport, CT: Greenwood Press. p. 57

²³ Mozaffari, Mahdi (1993). "Changes in the Iranian political system after Khomeini's death". *Political Studies XLI*: h. 611–617 diakses pada tanggal 25 Oktober 2013.

Shah dan membuatnya sering ditangkap dan dipenjarakan oleh rezim Shah dikarenakan alasan politik.

Mohammad Ali Rajai meniti karirnya dari seorang guru, bahkan ia pernah menjadi pedagang kaki lima. Pada tahun 1981, Muhammad Ali Rajai ditunjuk menjadi Presiden Iran yang kedua setelah Banisadr di impeachment oleh parlemen Iran. Muhammad Ali Rajai merupakan seorang presiden yang paling singkat menduduki presiden didunia dari tanggal 02 sampai dengan 30 Agustus 1981. Sebelum menjadi presiden ia menjabat sebagai perdana menteri di era Banisader. Mohammad Ali Rajai dibunuh dalam serangan bom pada 30 Agustus 1981 bersama dengan perdana menteri Javad Bahonar di kantor perdana menteri di Tehran. Mohammad Ali Rajai merupakan salah seorang presiden Iran yang paling dicintai rakyatnya karena kebijakan-kebijakan politiknya yang populis dan memihak kepada rakyat kecil, karena dia memang lahir dari seorang rakyat jelata.

Selain itu, dalam politik luar negerinya, Mohammad Lai Rajai selalu mengkritik kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang sering menindas negara-negara yang menurut Amerika Imperior. Ali Rajai bahkan pernah menyebut Amerika Serikat sebagai setan besar sedangkan Uni Soviet adalah setan yang rendah.

4. Politik Luar Negeri Iran di Era Ali Khomenei

Sebelum menjadi rahbar dan menggantikan posisinya gurunya yaitu Imam Khomenei sebagai pemimpin tertinggi Iran (Supreme Leader)²⁶, Ali Khomenei pernah menjadi Presiden Iran yang ketiga selama dua periode. Ali khamenei lahir pada tanggal 17 Juli 1939. Ali Khamenei menjabat Presiden Iran dari tahun 1981 sampai dengan 1989. Ali Khamenei pernah menjadi korban percobaan pembunuhan pada tahun 1981 yang mengakibatkan luka pada lengan kanannya.²⁷

Ali Khamenei secara intensif mengikuti kelas agama ditingkat dasar dan melanjutkan di hawza elmiyah Masyhad dibawah bimbingan gurunya seperti ayatullah Hashem Qazvini dan ayatullah Milani, ia kemudian pergi ke najaf Irak pada tahun 1957. Namun pada tahun 1958 Ali Khamenei kembali ke kota Qom dan melanjutkan studi agamanya dibawah bimbingan Ruhullah Imam Khomenei dan seyyed hossein borujerdi dan allamah thabataba'i.

²⁶ Setelah Imam Khomeini meninggal di Tehran pada tanggal 3 Juni 1989 pada usia 86 tahun, Ali Khamenei terpilih menjadi Rahbar oleh Majelis Khobregan

²⁷ Maziar Bahari (6 April 2007). "How Khamenei Keeps Control". *Newsweek*. Diakses pada tanggal 07 Agustus 2013

Kemudian ia pernah terlibat dalam kegiatan gerakan keislaman yang menyebabkan penangkapannya di Birjand selatan propinsi Khorasan.

Semenjak tinggal di kota Qom Ali Khamenei mulai memasuki medan perjuangan politik Imam Khomeini melawan politik anti-Islam ala Amerika Serikat (AS) yang digulirkan oleh Rezim Syah Pahlevi. Selama 16 tahun Ali Khamenei berjuang dan harus melalui berbagai kondisi termasuk penjara dan pengasingan. Selama itu pula ia tidak gentar menghadapi segala bentuk ancaman bahaya yang dilancarkan oleh rezim diktator Shah Pahlevi.

Pada tahun 1959, Ali Khamenei diinstruksikan oleh Imam Khomeini untuk menyampaikan pesannya kepada Ayatullah Milani dan para ulama lainnya di Propinsi Khorasan soal mekanisme program dakwah para ulama dan ruhaniwan di bulan Muharram dan penyingkapan kebobrokan politik Rezim Syah dan AS, serta menyangkut kondisi Iran dan kota suci Qom. Misi itu dijalankannya dengan baik dan dalam dakwahnya, seperti yang telah dimandatkan oleh Imam Khomeini, Ayatollah Khamenei mengungkap kebobrokan Rezim Syah dan politik AS. Oleh sebab itu, pada tanggal 2 Juni 1963 Ali Khamenei ditangkap dan ditahan.

Pada tahun 1981, setelah pembunuhan Mohammad-Ali Rajai, Khamenei terpilih menjadi Presiden Iran dengan suara telak 95 persen suara dalam pemilihan presiden Iran. Pada bulan Oktober 1981 Ali khamenei secara resmi dilantik menjadi presiden Iran yang ketiga dan presiden pertama dari kalangan ulama setelah mendapat pengukuhan dari Imam Khomeini. Dalam pidato pelantikannya sebagai presiden, Ali Khamenei berjanji akan menghilangkan segala bentuk penyimpangan, Liberalisme, dan pengaruh dari Amerika Serikat.

Khamenei berperan penting dalam menjaga kedaulatan Iran setelah pada tahun 1980 Irak mulai melancarkan serangannya ke Iran. Sebagai presiden, ia mulai menguatkan sistem pertahanan Iran melalui penguatan pasukan militer dan pasukan basiji yang loyal terhadap revolusi Islam.²⁸ Dalam hal kebijakan luar negerinya. Ali Khamenei termasuk salah satu tokoh yang mengecam atas pendudukan Amerika di Irak. Walaupun Iran dan Irak memiliki sejarah kelam, tetapi atas nama kemanusiaan, menurut Ali Khamenei tidak ada negara manapun yang dapat menindas terhadap negara lain, termasuk juga negara Irak.

Pada masa periode Ali Khamenei menjabat presiden, kebijakan luar negeri Iran lebih berfokus kepada permasalahan Iran dengan Irak. Untuk menjaga kedaulatan Iran, Ali

²⁸ http://www.iranchamber.com/history/islamic_revolution/revolution_and_iran_after1979_4.php

Khamenei berusaha menjaga persatuan dan pertahanan dalam negeri bersama Imam Khomeini. Selain itu pula, antara kepentingan dunia Islam sebagai landasan politik Iran dan kepentingan Iran selalu mengalami fluktuasi.

Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat yang “tidak senang” dengan revolusi Islam mulai melancarkan serangannya dengan membantu Irak dalam perang teluk. Perang Irak-Iran adalah salah satu peristiwa penting yang berpengaruh terhadap hubungan antara negara Iran dan Eropa selain juga dengan Amerika Serikat. Irak menginvasi Iran pada bulan September 1980 dan merebut beberapa bagian wilayah Iran. Negara-negara Eropa menyatakan bahwa mereka khawatir tentang perang yang terjadi antara Iran dan Irak dan mereka bersikeras pada pemecahan masalah dengan jalan damai atas dasar resolusi PBB dan menekankan bahwa mereka siap untuk rekonstruksi Irak dan Iran jika mereka mengakhiri perang.²⁹ Walaupun Uni Eropa pernah menyatakan ingin jalan damai dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara Irak dengan Iran, tetapi dalam praktiknya negara-negara Eropa lebih banyak mendukung Irak selama delapan tahun perang karena dalam sistem bilateral mereka membutuhkan dukungan dari Amerika Serikat untuk melawan Uni Soviet yang saat itu menyerang beberapa negara Eropa sehingga mereka mengikuti kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran.³⁰

Alasan Amerika Serikat tidak menyukai Iran selain karena revolusi yang terjadi juga dikarenakan para pendukung dan loyalis Imam Khomeini pada awal masa-masa revolusi menyegel kedutaan Amerika Serikat. Kemudian, presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter meminta dukungan dari negara-negara Eropa dalam krisis sandera yang dilakukan loyalis dan pendukung Imam Khomeini serta memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Iran. Akibatnya, negara-negara Eropa mengutuk Iran dan meminta mereka untuk membebaskan sandera Amerika Serikat.³¹ Setelah itu, negara-negara Eropa menyatakan akan mendukung Amerika Serikat di PBB dalam melawan Iran. Negara-negara Eropa menegaskan apabila Iran tidak menghargai hukum internasional, maka mereka akan mengurangi hubungan diplomatiknya dengan Iran dan juga akan memberlakukan sanksi ekonomi yang menyebabkan politik dan ekonomi Iran terjun bebas ke dasar yang paling rendah.

Negara-negara Eropa sebagai sekutu Amerika Serikat mengadopsi kebijakan yang sama terhadap Iran. Hubungan antara Uni Eropa dengan Iran semakin tegang dengan kasus

²⁹ Velayati, A. A. (1997). *Political History of Imposed War of Iraq against Islamic Republic of Iran*. Tehran: Daftare Nashre Farhange Eslami.

³⁰ Naghibzadeh, A. (2003). *European Union since Outset*. Tehran: ghomes.

³¹ Valdani, A. J., & Ansari, A. R. (1995). *United Europe and its relations with Iran*. Tehran: Ministry of Economy and Finance.

fatwa dari supreme leader Iran yang memerintahkan untuk menangkap Salman Rusdie dikarenakan menghina al-Qur'an dalam tulisannya yang berjudul "the Satanic Verse".

Pada tanggal 20 Agustus 1988 Irak dan Iran akhirnya setuju untuk melakukan gencatan senjata berdasarkan resolusi PBB nomor 598 dan membuat kedua belah pihak saling tukar menukar tawanan perang dan kemudian dilanjutkan dengan membuka hubungan diplomatik. Setelah perang selesai, wilayah-wilayah yang menjadi bahan sengketa statusnya kembali seperti sebelum perang dan batas kedua negara juga tidak berubah. Wilayah perairan Shatt al- Arab yang menjadi sengketa tetap dibagi menjadi milik kedua negara.

Setelah Irak dan Iran melakukan gencatan senjata, menteri luar negeri Luxemburg, Belanda dan Italia datang ke Iran untuk bernegosiasi secara bilateral dan menyatakan kesiapan mereka untuk mempromosikan hubungan politik dan ekonomi dengan Iran.³² negosiasi ini menormalkan kembali hubungan Iran dengan negara-negara Eropa.

5. Politik Luar Negeri Iran di era Hashemi Rafsanjani

Ali Akbar Hashemi Rafsanjani adalah seorang taipan minyak asal Iran lahir pada tanggal 25 Agustus 1934 di desa Bahraman provinsi Kerman³³ dan terpilih menjadi presiden Iran yang keempat dari tahun 1989 sampai dengan 1997 selama dua periode. Selama perang Irak-Iran, Rafsanjani menjadi komandan Militer.

Setelah delapan tahun memburuknya politik luar negeri Iran di bawah presiden Khomeini, Rafsanjani berusaha membangun kembali hubungan dengan negara-negara Arab serta dengan negara-negara di Asia Tengah termasuk dengan Azerbaijan, Turkmenistan dan Kazakhstan. Namun, hubungan dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat tetap tidak mengalami perubahan, meskipun Rafsanjani dapat menangani persoalan krisis yang terjadi di Iran. Pada tahun 1991, Rafsanjani berusaha memperbaiki hubungan Iran dengan Barat, meskipun ia tetap menolak menghapuskan fatwa mati Imam Khomeini terhadap penulis Inggris Salman Rusdi.

Pasca perang Irak-Iran, kebijakan luar negeri Iran lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam negeri. Kekurangan pangan dan kelemahan pemenuhan ekonomi yang terjadi selama perang teluk, membuat Hashemi harus merekonstruksi kebijakan ekonomi dalam negerinya. Selain itu, dengan berakhirnya perang dingin dan runtuhnya Uni Soviet telah mengubah sistem internasional dimana banyak negara merubah kebijakan luar negerinya terhadap negara lain. Dalam masa transisi sistem internasional

³² Sanaie, A. (2001). Detente in Relations of Iran and Europe. Bardashte dovom

³³ <http://www.rafsanjani.ir/>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2013

Hashemi Rafsanjani berusaha menerapkan kebijakan pragmatis dengan menggabungkan prinsip-prinsip tradisional Republik Islam Iran dengan kebutuhan dalam negeri untuk perubahan ekonomi di satu sisi dan membuat keseimbangan antara realisme dan ideologi republik Islam Iran di sisi lain.³⁴

Setelah peperangan yang memakan waktu dan keuangan yang cukup signifikan, Rafsanjani berusaha menempatkan penanganan persoalan domestik dan ekonomi menjadi prioritas utama. Persoalan persoalan domestik seperti ; pengangguran, inflasi dan tidak stabilnya harga pokok dalam negeri menjadi pusat perhatian Rafsanjani.³⁵ Untuk itu, untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan dalam negeri, semuanya bergantung diplomasi Rafsanjani terhadap negara negara lain. Rafsanjani berusaha memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan negara negara Eropa karena Eropa memiliki dua negara yang cukup berpengaruh di PBB.

Akan tetapi, kasus Salman Rusdi, warga negara Inggris yang menerbitkan bukunya yang berjudul “Satanic Verse” telah menghina Nabi Muhammad Saw. Selain mendapat kecaman dan kutukan dari Iran, buku karangan Salman Rusdi ini mendapat protes dari seluruh umat Islam khususnya Imam Khomeini yang mengeluarkan fatwa bahwa Salman Rusdi harus dihukum mati, membuat hubungan Iran dengan negara-negara Eropa menjadi lambat dan menegang.

Negara negara Eropa bereaksi keras terhadap sikap Iran dan fatwa mati Salman rusdi yang pada gilirannya membuat hubungan Iran dengan negara negara Eropa semakin tegang terutama dengan Inggris. Pemimpin Negara negara Eropa menyatakan bahwa fatwa Imam Khomeini adalah reaksi radikal dan hanya berlaku bagi kalangan umat Muslim Syiah bukan untuk Sunni serta menentang asas kebebasan berekspresi.

Negara negara Eropa mengabaikan dan mengesampingkan fatwa Imam Khomeini dengan membatasi hubungan diplomatik dengan Iran dan mengeluarkan resolusi sebagai reaksi terhadap fatwa Imam Khomeini di Strasbourg, Prancis.³⁶ Dalam menyikapi negara negara Eropa, Iran meminta para duta besarnya yang bertugas di Swedia, Italia, dan Spanyol untuk meninggalkan negara tersebut dan meminta kepada Inggris untuk meminta maaf atas penerbitan buku Satanic Verse. Akan tetapi barat menyikapi secara dingin, bahkan hubungan Iran dengan barat semakin kritis dengan ditangkapnya warga Iran dan Lebanon di Jerman.

³⁴ Fakhreddin Soltani and Reza Ekhtiari Amiri, *Foreign Policy of Iran after Islamic Revolution*, Journal of Politics and Law, Vol. 3, No. 2; September 2010 h. 202

³⁵ Amiri, A. (2006). *The foreign Policy of Islamic Republic of Iran*. Tehran: Oloome Novin.

³⁶ Valdani, A. J., & Ansari, A. R. (1995). *United Europe and its relations with Iran*. Tehran: Ministry of Economy and Finance

6. Politik Luar Negeri Iran di era Mohammad Khatami

Mohammad Khatami lahir di Ardakan Iran pada tanggal 29 September 1943. Pada pemilihan presiden tahun 1997, Khatami merupakan salah satu calon terkuat dari empat calon presiden yang ada. Mohammad Khatami didukung oleh kalangan pemuda, perempuan dan kaum intelektual sehingga dalam pemilihan presiden Khatami mendapat 70 persen suara masyarakat Iran.³⁷ Khatami menjabat Presiden Iran selama dua periode dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2005. Kemenangan Khatami dalam pemilihan presiden 1997 merupakan titik balik hubungan diplomatik Iran dengan negara negara Eropa.

Mohammad Khatami memulai politik luar negerinya dengan bergerak dari arah konfrontasi ke arah konsiliasi. Khatami lebih memilih konsiliasi ketimbang harus berbenturan dengan negara lain terutama dengan negara yang memiliki pengaruh besar di dunia. Akan tetapi, hubungan Iran dengan USA sama seperti tahun tahun sebelumnya karena saling mencurigai satu sama lain.

Dalam pendekatan politik luar negerinya, Khatami lebih memilih pendekatan reformis dengan berdasarkan pada dua pilar.³⁸

1. Pengenduran dalam pengambilan kebijakan luar negeri Iran untuk memecahkan masalah Iran dengan negara negara lain
2. Reformasi politik dalam urusan dalam negeri

Pengenduran dalam kebijakan luar negeri Iran dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan antara Iran dengan negara lain, khususnya dengan negara negara eropa yang sebelumnya semakin memanas. Khatami berusaha untuk menghindari prioritas ideologis karena bisa membuat masalah dalam proses meningkatkan hubungan Iran dengan negara-negara lain. Untuk itu, negara negara Eropa yang terlebih dulu berkonsiliasi dengan Iran “membujuk” Amerika Serikat untuk membuka kembali hubungan diplomatiknya dengan Iran. Sikap Eropa yang berubah terhadap Iran membuat Iran semakin kuat di kawasan. Ini di tandai dengan pengaruh Iran terhadap negara negara kawasan seperti Lebanon, Syiria dan Afghanistan.

Sedangkan untuk mengatasi masalah dalam negeri, Khatami mengurangi karakter Ideologis dan memperkuat demokrasi. Khatami mencoba untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antara kewenangan presiden, parlemen, dewan lokal dan lembaga lembaga

³⁷ "[Profile: Mohammad Khatami](#)". *BBC News*. 6 June 2001. Diakses pada tanggal 13 September 2013

³⁸ Amiri, A. (2006). *The foreign Policy of Islamic Republic of Iran*. Tehran: Oloome Novin

keagamaan. Selain itu, dalam upayanya mereformasi politik dalam negeri Khatami berusaha menempatkan media pemerintah menjadi lebih netral dan independen.

Program nuklir Iran yang sudah dibangun pada masa Shah Pahlevi, membuat Eropa dan Amerika tetap menaruh curiga kepada Iran. Negara-negara Eropa menentang program nuklir Iran dikarenakan :

1. Eropa dan Amerika Serikat tidak akan pernah mempercayai Iran yang mengklaim bahwa program nuklir Iran untuk perdamaian bukan untuk pengembangan senjata nuklir.³⁹
2. Jarak antar Eropa dan Iran yang begitu dekat, membuat Eropa harus ekstra waspada dengan senjata nuklir Iran karena akan mengancam keamanan negara-negara Eropa.
3. Pengalaman Eropa selama perang dingin, yang di teror oleh nuklir, membuat negara-negara Eropa takut mengalami hal yang sama yang akan terjadi di timur tengah.
4. Negara-negara Eropa berpendapat, pelanggaran Iran terhadap perjanjian non-proliferasi tidak dapat ditoleransi dan harus segera dihentikan. Karena apabila tidak dihentikan, negara-negara lain akan mengikuti Iran dengan memproduksi senjata nuklir.

Kemudian Khatami berusaha menjalin kerjasama sebaik mungkin dengan Uni Eropa dengan cara bekerjasama dengan IAEA dalam program nuklirnya dan mencari alternatif yang menguntungkan kedua pihak. Dalam kaitannya dengan isu-isu politik dan ekonomi dalam negeri, maka Khatami tidak melepaskan negosiasi dengan Eropa untuk mencapai kepentingan dalam negeri Iran di dunia internasional.

Selain persoalan nuklir, persoalan hak asasi manusia yang terjadi di dalam negeri juga berusaha dipecahkan oleh Khatami dalam kaitannya menjaga hubungan dengan Eropa dan Amerika Serikat. Khatami berusaha menekankan keadilan, kebebasan berekspresi dan kebebasan berpolitik sehingga mendapat respon yang positif dari Eropa dan Amerika. Untuk itu, Khatami berusaha menyeimbangkan prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam konstitusi Republik Islam Iran dengan prinsip hak asasi manusia yang berlaku di dunia internasional.

³⁹ Pada tanggal 11 Mei 1995 di New York lebih dari 170 negara di dunia sepakat untuk menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir (NPT) tanpa batas waktu dan tanpa syarat, perjanjian ini memiliki tiga okok utama ; yaitu non-proliferasi, perlucutan dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai

Dalam pembukaan konstitusi Iran disebutkan bahwa persoalan sosial, pidana, fiskal, ekonomi, administrasi, militer dan politik yang diatur dalam konstitusi Republik Islam Iran harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.⁴⁰

7. Politik Luar Negeri Iran di Era Mahmoud Ahmadinejad

Mahmoud Ahmadinejad lahir di Aradan, Provinsi Semnan, Iran sekitar 120 kilometer arah tenggara [Teheran](#) pada tanggal 28 Oktober 1956⁴¹. Ahmadinejad adalah presiden keenam Iran selama masa revolusi dengan memperoleh 61,91 persen suara dalam pemilihan presiden tahun 2005. Sebelum menjabat presiden, Ahmadinejad pernah menjadi walikota Tehran dari tahun 2003 hingga 2005. Ahmadinejad mengganti namanya dari Mahmoud Sabourjian dengan Mahmoud Ahmadinejad ketika pindah ke Tehran bersama orang tuanya. Ahmadinejad dikenal secara luas sebagai seorang tokoh [konservatif](#) yang sangat loyal terhadap nilai-nilai [Revolusi Islam Iran](#).

Ahmadinejad meraih gelar doktornya dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Olomeva dengan jurusan Teknik dan perencanaan transportasi. Semenjak mahasiswa, Ahmadinejad sudah aktif dalam organisasi kemahasiswaan seperti Perhimpunan Mahasiswa Islam (Anjuman Islami Daneshjouyan). Ahmadinejad merupakan wakil dari generasi muda yang selama masa perang Irak-Iran berada di garis terdepan bersama pasukan militer dan kawan-kawannya dari basiji mengusir Irak dari Iran.⁴²

Pemikiran Ahmadinejad yang konservatif menunjukkan perbedaan dalam mengambil kebijakan politik luar negerinya dibandingkan dengan dua mantan presiden sebelumnya (Khatami dan Rafsanjani) yang mengedepankan konsiliasi dan berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat. Ahmadinejad memandang, kebijakan luar negeri yang diambil Barat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan tidak dapat ditolerir kecuali Barat mau merubah pandangannya terhadap dunia Islam dan nilai-nilai kemanusiaan.

Selama masa kepresidenannya, kebijakan luar negeri Iran dikembalikan kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai seperti yang dicita-citakan dalam awal revolusi Islam Iran. Ahmadinejad mengkritik status quo dalam sistem internasional dan menegaskan harus ada perubahan dalam sistem internasional karena sistem yang ada sekarang tidak tepat untuk

⁴⁰ The constitution of Republic Islamic of Iran, Ministry of Interior Iran, 1979 dan diamandemen pada tahun 1989

⁴¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Mahmud_Ahmadinejad, diakses pada tanggal 20 Oktober 2013, lihat juga buku Muhsin Labib Dkk, Ahmadinejad! David di Tengah Angkara Goliath Dunia, hikmah, 2006

⁴² <http://hazratagha.blogfa.com/post-24.aspx>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2013

kepentingan masyarakat internasional secara menyeluruh. Dalam pidatonya pada 10 Oktober 2009, Ahmadinejad menyatakan bahwa revolusi Islam Iran akan tetap berjalan dan tidak akan mundur sekalipun dari tujuan revolusi Islam dan akan merespon setiap manuver politik barat.

Sikap tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup mendasar jika dikaitkan dengan pendekatan yang dilakukan oleh dua mantan presiden sebelumnya. Akan tetapi, Poin penting yang perlu dicatat selama Ahmadinejad menjabat presiden adalah sebagai berikut :

1. Mengabaikan organisasi-organisasi internasional, khususnya yang disetir oleh barat
2. Kebijakan luar negerinya anti terhadap Israel
3. Mengkritik peraturan atas kepemilikan senjata nuklir
4. penyangkalan tragedi Holocaust⁴³, dan menyatakan bahwa ia akan menyoroiti isu kebebasan berbicara dan hak untuk penelitian terhadap kasus holocaust yang sebenarnya⁴⁴

Menurut sebuah laporan pemberitaan Republik Islam Iran, Ahmadinejad mengatakan bahwa Eropa telah menciptakan mitos dalam nama holocaust dan menganggapnya berada di atas tuhan, agama dan para nabi.⁴⁵ Pada tanggal 30 Mei 2006 dalam wawancara dengan Der Spiegel, Ahmadinejad mengungkapkan bahwa ada dua pendapat dalam tragedi Holocaust. Ketika ditanya apakah Holocaust adalah mitos, ia menjawab "Saya hanya akan menerima sesuatu sebagai kebenaran jika saya benar-benar yakin akan hal itu". Dia juga mengatakan, "Kami berkeyakinan bahwa, jika kejadian sejarah sesuai dengan kebenaran, kebenaran ini akan terungkap semua lebih jelas jika ada lebih banyak penelitian ke dalamnya dan lebih banyak diskusi tentang hal itu.

Selain Tragedi Holocaust, Ahmadinejad juga mengkritik sistem internasional bahwa organisasi internasional adalah alat Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin dan dengan runtuhnya Uni Soviet sama sekali tidak merubah sistem internasional. Sistem Internasional adalah alat untuk mencapai kepentingan negara Amerika Serikat. Sedangkan dalam struktur dewan keamanan PBB Ahmadinejad ingin merestrukturisasi yang selama ini hanya dikuasai oleh Amerika, Inggris, Perancis, Rusia dan China. Menurut Ahmadinejad,

⁴³ Holocaust adalah [genosida](#) terhadap kira-kira enam juta [penganut Yahudi](#) Eropa selama [Perang Dunia II](#), suatu program [pembunuhan](#) sistematis yang didukung oleh negara [Jerman Nazi](#), dipimpin oleh [Adolf Hitler](#), dan berlangsung di seluruh wilayah yang dikuasai oleh Nazi. Liat juga buku karangan Niewyk, Donald L. *The Columbia Guide to the Holocaust*, Columbia University Press, 2000, hlm.45

⁴⁴ [Iran's president: I don't deny Holocaust](#)". *Daily News* (New York). 24 September 2007.

⁴⁵ ["Holocaust a myth, says Iranian president"](#). *The Guardian* (London). Associated Press. 14 December 2005

dominasi negara negara tersebut terhadap keputusan PBB merupakan sebuah ketidakadilan yang harus dihapuskan.

Selanjutnya, Ahmadinejad menyatakan bahwa Iran akan melanjutkan program nuklirnya dan tidak akan pernah membatasi dirinya dengan peraturan-peraturan yang tidak adil.⁴⁶ Ia menyatakan bahwa negara-negara besar tidak memiliki hak untuk memutuskan tentang program nuklir Iran. Dewan Keamanan PBB dibawah pengaruh anggota tetap seperti ; USA, Inggris, Rusia, Perancis China, maka Iran tidak akan menerima keputusan dewan keamanan PBB sebelum struktur dalam dewan keamanan PBB di restrukturisasi.⁴⁷ Selain itu, menurut Ahmadinejad, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa berusaha mendestabilisasi keamanan Iran karena Iran tidak menerima sistem yang tidak adil dan sepihak. Dia mengkritik cara-cara hubungan antara negara kaya dengan negara miskin yang disebutnya dengan istilah Utara-Selatan.

Ketidakadilan yang terjadi antara negara maju dan negara miskin harus diubah dan Iran akan melawan ketidakadilan tersebut. Oleh karena itu, selama Ahmadinejad menjadi presiden kebijakan luar negeri Iran lebih diarahkan kepada perlawanan terhadap Israel dan Amerika dan mengembangkan nuklir untuk tujuan damai serta menyatukan umat muslim diseluruh dunia untuk bersama-sama melawan imperialisme.

Pada tanggal 23 September 2009, di depan majelis umum PBB Ahmadinejad menyampaikan pidatonya yang berfokus kepada peperangan yang melibatkan barat serta agresi dan intimidasi di timur tengah dan Afghanistan. Dalam pidatonya Ahmadinejad menyampaikan bahwa Teheran siap untuk berjabat tangan dengan semua pihak yang jujur dan cinta kedamaian. Tapi kemudian Ahmadinejad melontarkan kritiknya terhadap barat yang menurutnya munafik dengan mengajarkan dan menyebarkan demokrasi di dunia tetapi mereka juga yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi tersebut.

8. Politik Luar Negeri Iran di Era Hassan Rouhani

Hassan Rouhani adalah seorang ulama Iran lahir di Sorkheh Provinsi Semnan pada tanggal 12 November 1948 bertepatan dengan 21 Aban 1327 Hijriyah Syamsiah dan tumbuh dalam keluarga yang taat agama. Sebelum menjadi presiden Iran, Hassan Rouhani pernah meniti

⁴⁶ M. Ahmadinejad, (25 Sep 2009). Meeting of Ahmadinejad with Spanish language medias and editors. From President's Official site, <http://www.president.ir>

⁴⁷ Ahmadinejad. (11 Feb 2008). Speech from President's Official site, <http://www.president.ir>

karir sebagai seorang pengacara⁴⁸ akademisi dan diplomat. Pada tanggal 7 Mei 2013 Rouhani mencalonkan diri menjadi presiden yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2013. Jika terpilih sebagai presiden, ia berjanji akan mempersiapkan suatu piagam yang dalam istilah dia adalah “piagam hak-hak sipil” serta akan memulihkan perekonomian dan meningkatkan hubungan diplomatik Iran dengan negara-negara barat.

Pada tanggal 15 Juni pada tahun yang sama, akhirnya Rouhani terpilih menjadi presiden Iran yang ketujuh dan mengalahkan walikota Teheran Mohammad Bagher Ghalibaf dan empat kandidat lainnya.⁴⁹

Pada bulan September tahun 2013 Rouhani berkunjung ke New York. Kunjungannya ini mendapat apresiasi yang bagus sebagai kemajuan besar dalam hubungan Iran dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Hassan Rouhani pernah menyatakan bahwa pemerintahannya siap untuk mengadakan pembicaraan dengan Amerika Serikat setelah tiga puluh dua tahun mengalami kemunduran.

Pada tanggal 27 September 2013, setelah kedua negara bertemu dengan menteri luar negeri P5 + 1, Hassan Rouhani menelepon Presiden Barack Obama dan siap menjalin hubungan diplomatik yang lebih baik dengan Amerika Serikat. Namun karena kejadian tersebut, kalangan konservatif Iran mengeluarkan sikap protes terhadap Rouhani.

Secara garis besar, terdapat perkembangan positif dalam politik luar negeri Iran setelah Rouhani terpilih jadi Presiden. Perkembangan positif tersebut ditandai dengan fokusnya Hassan Rouhani terhadap hak-hak sipil yang sebelumnya banyak pelanggaran yang mengakibatkan banyaknya warga sipil yang luka dan meninggal saat menentang kebijakan presiden Ahmadinejad pada tahun 2008 hingga 2010. Selain itu, dalam politik luar negerinya Rouhani berjanji akan meredakan ketegangan Barat dan Iran menyangkut program nuklirnya.

Janji untuk meredakan ketegangan tersebut ditepati oleh Rouhani dengan menghadiri pertemuan dengan negara-negara P5 +1 yang terdiri atas AS, China, Inggris, Jerman, Prancis dan Rusia pada tanggal 26 September 2013. Pertemuan yang dilakukan di sela-sela Sidang Umum (SU) PBB di New York itu difokuskan untuk menyelesaikan masalah program nuklir Iran, yang sampai saat ini masih terkatung-katung. Pertemuan yang dihadiri Presiden Iran Hassan Rouhani, itu berjalan tidak begitu lama karena semua pihak yang hadir langsung bersepakat untuk segera menuntaskan masalah tersebut dalam tempo yang singkat. Rouhani sendiri menargetkan selesai dalam tempo satu tahun. Untuk menunjukkan keseriusan

⁴⁸ Hassan Rouhani, (2008). *Memoirs of Hassan Rouhani; Vol. 1: The Islamic Revolution* (in Persian). Tehran, Iran: Center for Strategic Research

⁴⁹ "[Hassan Rouhani leads Iran presidential election vote count](#)". *BBC News*. 15 June 2013

diplomasi Iran, Rowhani membawa proposal tentang nuklir Iran di pertemuan berikutnya pada 15-16 Oktober 2013 di Jenewa.

Penutup

Kebijakan politik luar negeri Iran yang berdasarkan atas nilai nilai Islam sering kali mengalami perubahan tergantung kepada pola pikir seorang presiden meskipun tetap dalam jalur revolusi. Namun dalam menafsirkan pesan revolusi, para pemimpin Iran berbeda pendapat dalam mengaplikasikannya. Walau bagaimanapun, dari kebijakan luar negeri yang diambil oleh para pemimpin Iran memiliki peran dan misi untuk mencapai kepentingan dalam negerinya.

Khatami dan Hasan Rouhani contohnya, kedua pemimpin Iran tersebut berusaha untuk merajut kembali hubungan Iran dengan Eropa dan Amerika Serikat dengan mengambil jalan tengah dan rekonsiliasi sehingga kepentingan Iran bisa dibawa ke pentas internasional. Tetapi Ahmadinejad tetap pada pendiriannya, bahwa apabila barat dan Amerika Serikat tidak merubah pandangannya terhadap terhadap dunia Islam khususnya Republik Islam Iran, serta merubah sistem internasional di dewan keamanan PBB, Ahmadinejad tetap bersikeras akan berjalan sesuai dengan nilai nilai luhur Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadian, Hossein (1377), *The Political Biography of Mozaffar Baghai* (in Persian), Teheran, Political Studies and Research Institut
- Abrahamian, Ervand, *Iran Between Two Revolutions*, (1982), Princenton University Press, New Jersey
- Abrahamian, Ervand (2008), *History of Modern Iran*, Cambridge University Press
- Amiri, A. (2006). *The foreign Policy of Islamic Republic of Iran*. Tehran: Oloome Novin
- Djelantik, Sukawarsini (2008), *Diplomasi antara teori dan Praktik*, Yogyakarta ; Graha Ilmu
- E, Fuller, Graham (2003), *The Future of Political Islam*, Palgrave MacMillan
- Fauzi, Yahya (1386) *Tahavvolate Siyasi Ejtema'I ba' da az enghelabe Islami dar Iran*, Tehran : Aoruz Press
- Humphreys, Stephen (1999), *Between Memory and Desire: The Middle East in a Troubled Age*, University of California Press
- John E., Jessup, (1989). *A Chronology of Conflict and Resolution, 1945-1985*. New York: Greenwood Press
- Labib, Muhsin Dkk (2006), *Ahmadinejad! David di Tengah Angkara Goliath Dunia*, hikmah.
- Mujtahed Zadeh, Firouz (1387), *Demokrasi va hoveyyate Iran*, entesharat kavir, Tehran
- Rouhani, Hassan (2008). *Memoirs of Hassan Rouhani; Vol. 1: The Islamic Revolution* (in Persian). Tehran, Iran: Center for Strategic Research
- Valdani, A. J., & Ansari, A. R. (1995). *United Europe and its relations with Iran*. Tehran: Ministry of Economy